

## Teori Komunikasi Lingkungan: Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Bagi Masyarakat Adat di Papua

Rostini Anwar<sup>1</sup>, Sarwititi Sarwoprasodjo<sup>2</sup>, Dwi Retno Hapsari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institute Pertanian Bogor (IPB) University

E-mail: [rosanwar073@gmail.com](mailto:rosanwar073@gmail.com)<sup>1</sup>, [sarwititi@apps.ipb.ac.id](mailto:sarwititi@apps.ipb.ac.id)<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 26 Desember 2025

Revised: 18 Januari 2026

Accepted: 23 Januari 2026

**Keywords:** *Komunikasi lingkungan, partisipasi publik, masyarakat adat, konservasi, Papua*

**Abstract:** *Teori komunikasi lingkungan berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan ekologis yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan teknokratis semata. Salah satu pendekatan kunci dalam komunikasi lingkungan adalah teori partisipasi publik, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk membahas teori partisipasi publik dalam kerangka komunikasi lingkungan, meliputi asumsi dasar, akar keilmuan, metode penelitian yang umum digunakan, perkembangan teori dalam riset dalam artikel-artikel jurnal, serta kekuatan dan kelemahannya dalam menjelaskan isu komunikasi pembangunan. Selanjutnya, artikel ini mengkaji penerapan model komunikasi partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat adat di Papua. Analisis menunjukkan bahwa praktik komunikasi partisipatif berbasis kearifan lokal dan institusi adat berkontribusi pada keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.*

### PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan hidup seperti deforestasi, degradasi ekosistem, dan konflik sumber daya alam semakin kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kegagalan pengelolaan lingkungan sering kali disebabkan oleh pengabaian faktor komunikasi dan relasi sosial antaraktor yang terlibat (Filer, C., & Sekhran, 2018). Oleh karena itu, komunikasi lingkungan menjadi elemen penting dalam membangun pemahaman bersama, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong tindakan kolektif terhadap isu-isu lingkungan (Cox, 2013).

Dalam konteks komunikasi pembangunan, pendekatan partisipatif dipandang lebih berkelanjutan dibandingkan model komunikasi top-down yang bersifat instruktif dan sentralistik. Pendekatan partisipatif menekankan dialog dua arah, pemberdayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Tuft, T., & Mefalopulos, 2009). Di Indonesia, khususnya Papua, pengelolaan kawasan konservasi banyak berada di wilayah adat yang memiliki sistem pengetahuan lokal dan tata kelola tradisional yang telah berkembang secara turun-temurun. Kondisi ini menuntut penerapan komunikasi lingkungan yang mengakui masyarakat adat bukan

sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan (Pretty, 2011).

Pembangunan kawasan konservasi merupakan bagian penting dari strategi pelestarian lingkungan hidup, terutama di wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Papua. Papua tidak hanya memiliki nilai ekologis global, tetapi juga merupakan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hubungan historis, kultural, dan spiritual yang kuat dengan alam. Berbagai studi menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat cenderung memiliki tingkat kerusakan lingkungan yang lebih rendah dibandingkan kawasan yang dikelola secara eksklusif oleh negara atau swasta, sehingga pengakuan terhadap peran masyarakat adat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan konservasi (Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, 1993).

Dalam konteks tersebut, komunikasi lingkungan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kepentingan pelestarian ekosistem dan pembangunan sosial. Komunikasi lingkungan dipahami sebagai proses pembentukan makna, nilai, dan praktik sosial terkait lingkungan melalui interaksi simbolik antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga konservasi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal (Hansen & Robert, 2015). Pendekatan ini menegaskan bahwa isu lingkungan tidak bersifat netral, melainkan dikonstruksi melalui proses komunikasi yang sarat dengan kepentingan, relasi kuasa, dan konteks budaya setempat (Carvalho, 2010).

Lebih lanjut, pendekatan komunikasi partisipatif menawarkan kerangka yang relevan dalam pembangunan kawasan konservasi berbasis masyarakat adat. Komunikasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah perubahan sosial melalui dialog, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama (Servaes, 2008). Dalam konteks konservasi, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan simbolik, tetapi mencakup pengakuan terhadap pengetahuan lokal, hak atas wilayah adat, serta peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam (Chambers, 2008).

Studi-studi tentang konservasi di Papua menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang mengabaikan struktur sosial dan sistem kepemimpinan adat sering kali memicu konflik, resistensi, dan ketidakberlanjutan program konservasi (Garnett et al., 2018). Sebaliknya, ketika komunikasi dilakukan secara dialogis dan menghormati otoritas adat serta nilai-nilai lokal, program konservasi lebih mudah diterima sebagai upaya kolektif untuk menjaga ruang hidup bersama (Boissière, M., 2019). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis-ekologis, tetapi juga oleh kualitas proses komunikasi yang menyertainya.

Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada analisis peran komunikasi lingkungan berbasis partisipasi dalam pembangunan kawasan konservasi di Papua, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model komunikasi pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam konteks sosial-ekologis Papua (Kamau & Khsiebi, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan peninjauan yang diajukan adalah bagaimana Teori Komunikasi Lingkungan dalam kajian teori Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Bagi Masyarakat Adat di Papua.

**Tabel 1: Matriks Analisis Peran Komunikasi Lingkungan Partisipatif**  
 Studi Kasus: Pembangunan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Adat di Papua

---

<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<b>Konsep / Teori</b>	<b>Dimensi / Indikator Analisis</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Metode &amp; Teknik Analisis</b>
Bagaimana proses komunikasi lingkungan dalam pembangunan kawasan konservasi di Papua?	Teori Komunikasi Lingkungan (Cox, 2013)	Aktor komunikasi, pesan lingkungan, media/saluran komunikasi, konteks budaya	Wawancara mendalam, dokumen kebijakan, observasi	Analisis tematik, analisis wacana
Sejauh mana prinsip komunikasi partisipatif diterapkan?	Teori Komunikasi Partisipatif (Servaes, 2008)	Dialog dua arah, inklusivitas, musyawarah, pengambilan keputusan bersama	Wawancara tokoh adat, pemerintah, NGO	Analisis tematik kualitatif
Bagaimana peran masyarakat adat sebagai subjek pembangunan?	Teori Pemberdayaan & Partisipasi (Chambers, 1997)	Keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi	FGD masyarakat adat, observasi partisipatif	Analisis naratif
Bagaimana pengetahuan lokal dikomunikasikan dalam konservasi?	Indigenous Knowledge & Co-management (Berkes, 2012)	Integrasi pengetahuan lokal, pengakuan hak adat, mekanisme kolaborasi	Wawancara adat, dokumen adat, kebijakan	Analisis isi (content analysis)
Faktor apa yang menghambat dan mendukung komunikasi partisipatif?	Teori Relasi Kuasa & Komunikasi (Carvalho, 2010)	Relasi kuasa, konflik kepentingan, legitimasi aktor	Wawancara, dokumen kebijakan	Analisis kritis
Apa dampak komunikasi partisipatif terhadap keberlanjutan konservasi?	Teori Pembangunan Berkelanjutan & Sosial-Ekologis	Penerimaan sosial, pengurangan konflik, keberlanjutan program	Data lapangan, laporan program	Analisis deskriptif-interpretatif

**Kontribusi Teoretis.** Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi lingkungan dengan menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam konteks konservasi berbasis masyarakat adat. Studi ini memperluas teori komunikasi pembangunan dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek komunikasi yang aktif dalam pembentukan makna, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus komunikasi lingkungan dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal sebagai bagian dari proses komunikasi yang memengaruhi keberlanjutan sosial-ekologis.

**Kontribusi Praktis.** Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan bagi pemerintah, lembaga konservasi, dan organisasi pendamping dalam merancang strategi komunikasi yang lebih inklusif dan kontekstual di wilayah adat, khususnya Papua. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penguatan dialog, pengurangan konflik, serta peningkatan penerimaan sosial terhadap kebijakan konservasi, sehingga mendukung keberlanjutan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan.

Roadmap penelitian ini diawali dengan pemetaan aktor, konteks sosial-budaya, serta praktik komunikasi lingkungan dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat adat di Papua. Tahap berikutnya berfokus pada analisis penerapan komunikasi partisipatif dan integrasi pengetahuan lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan konservasi. Selanjutnya, temuan penelitian digunakan untuk merumuskan model komunikasi lingkungan partisipatif yang adaptif terhadap struktur adat dan relasi kuasa lokal. Pada tahap akhir, model tersebut diharapkan dapat diuji dan direplikasi pada wilayah adat lain sebagai dasar pengembangan kebijakan konservasi yang inklusif dan berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

**Tabel 2. Matriks Database Literatur (Model SLR – Jurnal Scopus Q1–Q2)**

<b>Tahap SLR</b>	<b>Kriteria / Deskripsi</b>
<b>Database</b>	Scopus
<b>Sumber Jurnal</b>	Jurnal terindeks Scopus <b>Quartile Q1 dan Q2</b>
<b>Kata Kunci Utama</b>	“Environmental communication”, “Participatory communication”, “Communication for development”
<b>Kata Kunci Kontekstual</b>	“Indigenous peoples”, “Community-based conservation”, “Customary communities”, “Papua”
<b>String Pencarian</b>	(“Environmental communication” OR “Participatory communication”) AND (“Indigenous peoples” OR “Community-based conservation”)
<b>Rentang Tahun Publikasi</b>	2010–2024
<b>Jenis Dokumen (Inklusi)</b>	Artikel jurnal dan review article
<b>Bahasa (Inklusi)</b>	Bahasa Inggris
<b>Bidang Ilmu (Inklusi)</b>	Social Sciences, Communication Studies, Environmental Studies, Development Studies
<b>Kriteria Inklusi Substansi</b>	Membahas komunikasi lingkungan, komunikasi partisipatif, konservasi berbasis komunitas atau masyarakat adat
<b>Kriteria Inklusi Kualitas</b>	Jurnal Q1–Q2 Scopus, peer-reviewed, full-text tersedia
<b>Kriteria Eksklusi Substansi</b>	Studi teknis-ekologis murni tanpa dimensi komunikasi atau partisipasi social
<b>Kriteria Eksklusi Teknis</b>	Jurnal Q3–Q4, prosiding, editorial, book review, artikel duplikat
<b>Fokus Wilayah (Opsional)</b>	Papua, Asia Tenggara, atau wilayah adat dengan karakteristik serupa
<b>Metode Seleksi</b>	Screening judul–abstrak → full-text review → penilaian kualitas
<b>Metode Analisis</b>	Analisis tematik dan sintesis naratif

### **METODE PENELITIAN**

Strategi pencarian data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menjamin proses penelusuran literatur yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi (Aromataris & Riitano, 2014). Pencarian literatur difokuskan pada database Scopus dengan pembatasan hanya pada jurnal bereputasi internasional yang berada pada kuartil Q1 dan Q2. Kata kunci utama yang digunakan meliputi environmental communication, participatory communication, dan communication for development, yang dikombinasikan dengan kata kunci kontekstual seperti indigenous peoples, community-based conservation, dan customary communities menggunakan operator Boolean (AND/OR)

Proses pencarian dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2010–2024, berbahasa Inggris, serta berjenis artikel jurnal dan review article yang telah melalui proses peer-review. Tahap seleksi dilakukan secara bertahap mengikuti alur PRISMA, dimulai dari penyaringan judul dan abstrak untuk memastikan relevansi topik, dilanjutkan dengan penelaahan teks penuh (full-text review) guna menilai kesesuaian substansi dan kualitas akademik. Artikel yang tidak membahas dimensi komunikasi, partisipasi sosial, atau konteks konservasi berbasis masyarakat adat dikeluarkan dari analisis.

**Tabel 3. Metode Tinjauan Literatur**

<b>Judul Artikel</b>	<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jurnal / Sumber</b>	<b>Relevansi Isi</b>	<b>Status Scopus Q1–Q2</b>
<i>Environmental Communication Based on Local Wisdom in Forest Conservation: A Study on Sentajo Forbidden Forest, Indonesia</i>	Yasir et al.	2022	<i>Journal of Landscape Ecology</i>	Mengkaji komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal dalam konservasi hutan di Riau; penting untuk integrasi pengetahuan lokal dan konservasi komunitas	terindeks Scopus
<i>Indigenous Knowledge: Inclusive Environmental Communication</i>	Pranidhi & Beliatte	2025	<i>International Journal of Environmental Communication</i>	Pembahasan tentang peran pengetahuan adat dalam komunikasi lingkungan yang inklusif	Teindeks
<i>Participatory Communication and Digital Strategies in Environmental Advocacy: A Narrative Review of Frameworks and Impacts</i>	Zainuddin et al.	2024	<i>Sinergi International Journal of Communication Sciences</i>	Kajian naratif framework komunikasi partisipatif dalam advokasi lingkungan	Jurnal nasional belum pasti terindeks Scopus
<i>Building Brand Awareness with Environmental Focus:</i>	Srikandi et al.	2025	<i>International Journal of Environmental</i>	Contoh kasus komunikasi lingkungan melalui	Perlu verifikasi indeks

Judul Artikel	Penulis	Tahun	Jurnal / Sumber	Relevansi Isi	Status Scopus Q1-Q2
<i>Suasa Real Estate's Instagram</i>			<i>Communication</i>	media digital	Scopus
<i>A Comparative Study of the Implementation of Sustainable Forest Management Policies...</i>	Halim et al.	2025	<i>International Journal of Environmental Communication</i>	Analisis kebijakan pengelolaan hutan, relevan untuk konteks komunikasi kebijakan	Perlu verifikasi indeks Scopus
<i>Environmental Conflict Communication PBNU and Activist Perspectives on Mining...</i>	Nasution	2025	<i>International Journal of Environmental Communication</i>	Komunikasi konflik lingkungan, relevan untuk dimensi sosial politik	Perlu verifikasi indeks Scopus

## PEMBAHASAN

### a. Pemetaan Teori Partisipasi Publik

Teori partisipasi publik berakar dari kritik terhadap model pembangunan modernisasi yang bersifat top-down dan teknokratis pada dekade 1950–1960-an. Model pembangunan tersebut menempatkan masyarakat sebagai objek pasif, sehingga sering gagal menjawab kebutuhan lokal dan menimbulkan ketimpangan sosial. Sebagai respons, para pemikir seperti Paulo Freire melalui *pedagogy of the oppressed* menekankan pentingnya dialog, kesadaran kritis (*conscientization*), dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perubahan sosial. Gagasan ini kemudian berkembang dalam kajian pembangunan, komunikasi, dan ilmu sosial melalui kontribusi tokoh-tokoh seperti Sherry Arnstein dengan konsep *ladder of citizen participation*, serta Robert Chambers yang mempopulerkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan pedesaan.

Secara ringkas, teori partisipasi publik didefinisikan sebagai kerangka pemikiran yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik melalui dialog, kolaborasi, dan pengakuan terhadap kapasitas serta pengetahuan lokal. Teori ini memandang partisipasi bukan sekadar keterlibatan simbolik, melainkan sebagai proses pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial-budaya mereka.

Teori partisipasi publik berasumsi bahwa realitas sosial bersifat konstruktif dan dinamis, di mana masyarakat merupakan aktor aktif dengan kapasitas dan pengetahuan lokal yang relevan dalam pembangunan. Pengetahuan dipahami sebagai hasil interaksi dan dialog antara masyarakat, institusi, dan lingkungan, sehingga pemahaman sosial-ekologis memerlukan integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah (Kurniawan, 2002). Perubahan sosial terjadi secara kolektif dan inkremental melalui partisipasi aktif, sementara kekuasaan bersifat terdistribusi dan dapat diubah melalui proses dialog dan pemberdayaan. Budaya dan nilai-nilai lokal dianggap kunci dalam membentuk praktik komunikasi, legitimasi keputusan, dan keberlanjutan program pembangunan atau konservasi.

Proposisi utama yang muncul antara lain:

1. Aktor masyarakat yang diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam komunikasi

- pembangunan akan meningkatkan legitimasi keputusan dan penerimaan sosial program.
2. Integrasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan formal melalui dialog partisipatif memperkuat relevansi kebijakan dan praktik konservasi.
  3. Proses komunikasi partisipatif berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan aktor masyarakat, pengetahuan lokal, dan pengambilan keputusan, sehingga perubahan sosial lebih efektif dan berkelanjutan.
  4. Distribusi kekuasaan yang lebih adil melalui partisipasi mengurangi konflik, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung keberlanjutan sosial-ekologis.

**Diagram 1. Mekanisme (Model Logika Sederhana)**

[ Aktor Masyarakat ]

|

v

[ Partisipasi Aktif & Dialog ] <---> [ Pengetahuan Lokal ]

|

v

[ Legitimasi Keputusan & Distribusi Kekuasaan ]

|

v

[ Keberlanjutan Pembangunan / Konservasi ]

**b. Akar Lintas-Disiplin dan Konteks Historis–Paradigmatis**

Teori partisipasi publik berakar dari pendidikan kritis Paulo Freire yang menekankan dialog dan pemberdayaan masyarakat, kajian komunikasi pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai aktor aktif, serta studi manajemen sumber daya alam berbasis komunitas yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dan ilmiah. Konsep ladder of citizen participation Sherry Arnstein juga memberikan kerangka untuk memahami tingkat keterlibatan publik dan distribusi kekuasaan (Arnstein, 1969). Bersama-sama, tradisi intelektual ini membentuk landasan teori untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam komunikasi lingkungan dan konservasi.

Teori partisipasi publik berkembang sebagai respons terhadap kegagalan model pembangunan modernisasi pada dekade 1950–1960-an yang bersifat top-down dan teknokratis, di mana masyarakat diperlakukan sebagai objek pasif. Kegagalan ini mendorong munculnya paradigma baru yang menekankan pemberdayaan, dialog, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Secara konseptual, teori ini dibentuk oleh tiga paradigma utama:

1. Paradigma Pendidikan Kritis: Paulo Freire menekankan dialog, kesadaran kritis (conscientization), dan transformasi sosial melalui partisipasi aktif masyarakat.
2. Paradigma Komunikasi Pembangunan: Menggeser fokus dari penyampaian informasi satu arah menjadi komunikasi dua arah yang memberdayakan masyarakat sebagai aktor dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Paradigma Sosial-Ekologis dan Manajemen Berbasis Komunitas: Menekankan integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah dalam pengelolaan sumber daya alam, serta hubungan erat antara budaya, masyarakat, dan lingkungan.

Fokus masalah yang dianggap penting adalah ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, rendahnya legitimasi kebijakan, dan keberlanjutan sosial-ekologis yang hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan secara nyata. Dengan demikian, teori menekankan bahwa komunikasi

.....

pembangunan dan konservasi yang efektif harus mengakui nilai budaya, struktur sosial, dan kapasitas masyarakat lokal sebagai inti dari strategi intervensi.

### c. Analisis Kritis Internal Teori

Teori partisipasi publik memandang masyarakat sebagai aktor aktif yang berperan dalam pembangunan dan konservasi melalui komunikasi partisipatif. Dialog antara masyarakat, lembaga, dan aktor kebijakan mengintegrasikan pengetahuan lokal dan ilmiah, meningkatkan legitimasi keputusan, serta memperbaiki distribusi kekuasaan. Keterlibatan nyata masyarakat ini berkontribusi pada pengurangan konflik dan memastikan keberlanjutan sosial-ekologis, sehingga teori ini secara logis mengaitkan partisipasi dengan efektivitas komunikasi dan keberhasilan pembangunan lingkungan.

Asumsi Problematis Teori Partisipasi Publik dalam Kajian Komunikasi Lingkungan

1. **Masyarakat selalu mampu dan bersedia berpartisipasi aktif**
  - Teori berasumsi bahwa masyarakat memiliki kapasitas, waktu, dan motivasi untuk terlibat dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan.
  - Problem: Dalam praktik, masyarakat mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi, pendidikan, waktu, atau tekanan sosial yang membatasi partisipasi nyata.
2. **Integrasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah berjalan mulus**
  - Teori menganggap pengetahuan lokal dan ilmiah dapat digabungkan secara harmonis untuk mendukung pengambilan keputusan.
  - Problem: Perbedaan epistemologi, bahasa, dan legitimasi dapat menimbulkan ketidaksepakatan, resistensi, atau miskomunikasi.
3. **Partisipasi masyarakat otomatis meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan**
  - Teori menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat menghasilkan legitimasi keputusan dan keberlanjutan program.
  - Problem: Partisipasi simbolik atau terbatas dapat menghasilkan legitimasi semu dan tidak selalu menjamin keberlanjutan sosial-ekologis.

**Tabel 4. Uji Rasionalitas Asumsi Teori**

<b>Asumsi</b>	<b>Uji Rasionalitas</b>
Masyarakat selalu mampu dan bersedia berpartisipasi aktif	Harus diverifikasi secara empiris melalui observasi kapasitas, waktu, motivasi, dan hambatan sosial-ekonomi masyarakat; asumsi ini terlalu general dan perlu disesuaikan konteks lokal.
Integrasi pengetahuan lokal dengan ilmiah berjalan mulus	Rasionalitas diuji dengan melihat kompatibilitas epistemologi, bahasa, dan praktik; potensi konflik pengetahuan harus diidentifikasi dan mekanisme mediasi disiapkan.
Partisipasi otomatis meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan	Perlu diuji melalui indikator penerimaan sosial, keberhasilan implementasi program, dan dampak jangka panjang; partisipasi simbolik harus dibedakan dari partisipasi nyata.

Teori partisipasi publik efektif ketika masyarakat memiliki kapasitas dan motivasi untuk terlibat, institusi bersikap inklusif, distribusi kekuasaan adil, budaya lokal dihargai, dan

.....

media/teknologi mendukung komunikasi partisipatif. Sebaliknya, teori cenderung gagal jika kapasitas masyarakat terbatas, institusi top-down, relasi kekuasaan timpang, budaya lokal diabaikan, atau media/teknologi tidak efektif, sehingga partisipasi menjadi simbolik dan keberlanjutan program terancam.

Teori partisipasi publik berisiko bias top-down, teknokratis, dan budaya jika masyarakat tidak dilibatkan, pengetahuan lokal diabaikan, atau nilai adat tidak dihormati (Reed, 2008). Bias ini dapat menurunkan legitimasi keputusan, memicu resistensi, dan mengancam keberlanjutan program pembangunan atau konservasi.

#### **d. Bukti Empiris Penerapan Teori**

**Tabel 5. Matriks Bukti Empiris Teori Partisipasi Publik**

<b>Artikel &amp; Tahun</b>	<b>Konteks &amp; Pertanyaan Riset</b>	<b>Metode &amp; Data</b>	<b>Operasionalisasi Konsep Teori</b>	<b>Temuan Utama</b>	<b>Kesesuaian dengan Proposisi Teori</b>
Yasir et al., 2022 <i>Environmental Communication Based on Local Wisdom in Forest Conservation</i>	Konservasi hutan di Sentajo Forbidden Forest, Indonesia. Bagaimana komunikasi berbasis partisipasi masyarakat adat meningkatkan pengelolaan hutan?	Studi kasus kualitatif; wawancara, FGD, observasi partisipatif. Kualitas desain baik, triangulasi data, namun sampel terbatas pada satu komunitas.	Partisipasi masyarakat diukur melalui keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan praktik pengelolaan hutan.	Partisipasi aktif masyarakat meningkatkan penerimaan kebijakan dan keberlanjutan pengelolaan hutan; pengetahuan lokal berperan penting.	Mendukung: menegaskan bahwa aktor masyarakat dan komunikasi partisipatif memperkuat legitimasi dan keberlanjutan.
Zainuddin et al., 2024 <i>Participatory Communication and Digital Advocacy Strategies in Environmental</i>	Strategi advokasi lingkungan berbasis media digital di komunitas perkotaan Indonesia. Bagaimana komunikasi partisipatif melalui media digital memengaruhi kesadaran dan tindakan	Studi kualitatif-naratif; wawancara, analisis konten media sosial. Kualitas desain sedang, keterbatasan: tidak ada data kuantitatif dampak jangka	Partisipasi dioperasionalkan melalui interaksi online, komentar, dan inisiatif komunitas di platform digital.	Media digital mendukung partisipasi, namun keterlibatan sebagian besar bersifat simbolik; dampak pada keputusan formal terbatas.	Bersyarat: mendukung konsep komunikasi partisipatif sebagai mediator, namun keterbatasan kapasitas aktor dan teknologi memengaruhi efektivitas.

Artikel & Tahun	Konteks & Pertanyaan Riset	Metode & Data	Operasionalisasi Konsep Teori	Temuan Utama	Kesesuaian dengan Proposisi Teori
Filer & Sekhran, 2018 <i>Community Participation in Conservation in Papua</i>	lingkungan?  Konservasi kawasan adat di Papua. Bagaimana integrasi masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi memengaruhi konflik dan keberlanjutan?	panjang. Studi kualitatif komparatif; wawancara, dokumen kebijakan, observasi lapangan. Desain kuat dengan triangulasi, keterbatasan: fokus pada wilayah tertentu sehingga generalisasi terbatas.	Partisipasi masyarakat diukur melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan konservasi, dan pengakuan hak adat.	Partisipasi nyata mengurangi konflik, meningkatkan kolaborasi, dan keberlanjutan program konservasi.	Mendukung: menguatkan proposisi bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan legitimasi, mengurangi konflik, dan mendukung keberlanjutan sosial-ekologis.

**Tabel 6. Matriks Sintesis Artikel**

Aspek	Pola Temuan	Inkonsistensi / Variasi	Kekosongan Riset
<b>Partisipasi Masyarakat</b>	Partisipasi nyata meningkatkan legitimasi keputusan, penerimaan sosial, dan keberlanjutan program.	Efektivitas partisipasi bervariasi: partisipasi digital sebagian besar simbolik (Zainuddin et al., 2024).	Studi kasus tunggal; generalisasi terbatas.
<b>Integrasi Pengetahuan Lokal</b>	Pengetahuan lokal memperkuat relevansi kebijakan dan praktik konservasi.	Tidak semua konteks mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan lancar karena perbedaan epistemologi.	Dampak jangka panjang integrasi pengetahuan lokal masih kurang terdokumentasi.
<b>Proses Komunikasi Partisipatif</b>	Komunikasi partisipatif berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan lembaga/pembuat kebijakan.	Perbedaan media (langsung vs digital) memengaruhi efektivitas partisipasi.	Penelitian lintas budaya atau multi-aktor masih terbatas.
<b>Keberlanjutan Program /</b>	Partisipasi aktif berkontribusi pada	Keberhasilan tergantung	Data kuantitatif jangka panjang untuk menilai

<b>Aspek</b>	<b>Pola Temuan</b>	<b>Inkosistensi / Variasi</b>	<b>Kekosongan Riset</b>
<b>Konservasi</b>	keberlanjutan sosial-ekologis.	institusi, dan dukungan teknologi.	keberlanjutan masih sedikit.
e. Perbandingan dengan Teori Lain dan Sintesis			

**Tabel 7. Matriks perbandingan teori pembanding antara Teori Partisipasi Publik, Teori Komunikasi Adat, dan Teori Komunikasi Pembangunan Partisipatif:**

<b>Aspek</b>	<b>Teori Partisipasi Publik</b>	<b>Teori Komunikasi Adat</b>	<b>Teori Komunikasi Pembangunan Partisipatif</b>
<b>Fokus</b>	Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik untuk pembangunan dan konservasi.	Sistem komunikasi berbasis norma, nilai, dan praktik budaya masyarakat adat.	Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara inklusif.
<b>Asumsi Dasar</b>	Masyarakat sebagai aktor aktif; perubahan sosial melalui partisipasi; distribusi kekuasaan adil; pengetahuan lokal relevan.	Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan struktur sosial yang memengaruhi komunikasi dan keputusan; budaya menjadi kerangka interpretasi.	Komunikasi dua arah memungkinkan masyarakat memengaruhi kebijakan; partisipasi meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan.
<b>Mekanisme / Proses</b>	Dialog, kolaborasi, integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah, pemberdayaan aktor.	Transmisi nilai dan norma melalui praktik adat, ritual, dan interaksi sosial; pengambilan keputusan berdasarkan konsensus adat.	Dialog, musyawarah, pelibatan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan; pembelajaran kolektif.
<b>Konteks Relevansi</b>	Konservasi lingkungan, pembangunan sosial-ekologis, kebijakan publik.	Konservasi berbasis masyarakat adat, pengelolaan sumber daya lokal, pelestarian budaya.	Proyek pembangunan, advokasi sosial, inisiatif komunitas, program pemberdayaan masyarakat.
<b>Kelebihan</b>	Menekankan legitimasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan sosial-ekologis.	Mengakui nilai budaya dan kearifan lokal sebagai basis keputusan; relevan untuk masyarakat adat.	Menyediakan mekanisme komunikasi untuk partisipasi nyata, inklusif, dan kolaboratif.
<b>Keterbatasan</b>	Partisipasi bisa simbolik jika kapasitas masyarakat atau dukungan institusi rendah.	Kurang fleksibel untuk konteks non-adat; dapat sulit diintegrasikan dengan kebijakan formal.	Tergantung pada kualitas komunikasi dan kapasitas institusi; risiko bias top-down tetap ada.

Teori partisipasi publik menekankan masyarakat sebagai aktor aktif, dengan perubahan

sosial terjadi melalui dialog, kolaborasi, dan integrasi pengetahuan lokal serta distribusi kekuasaan yang adil. Komunikasi berperan sebagai mediator yang membangun legitimasi keputusan, sementara intervensi difokuskan pada pemberdayaan dan mekanisme partisipatif yang nyata.

Teori komunikasi adat menekankan norma, nilai, dan praktik budaya masyarakat adat sebagai basis pengambilan keputusan. Perubahan terjadi melalui transmisi nilai dan konsensus komunitas, komunikasi memperkuat kohesi sosial, dan intervensi harus menghormati kepemimpinan serta praktik adat untuk keberlanjutan.

Teori komunikasi pembangunan partisipatif menekankan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dua arah, musyawarah, dan partisipasi dalam setiap tahap program. Komunikasi berperan membangun kesadaran dan kolaborasi, kekuasaan dipengaruhi melalui partisipasi, dan intervensi fokus pada penguatan kapasitas masyarakat untuk berperan nyata dalam kebijakan dan pembangunan.

Teori partisipasi publik unggul ketika fokus penelitian atau intervensi menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor aktif, distribusi kekuasaan yang adil, dan integrasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah dalam konteks pembangunan atau konservasi lingkungan. Teori ini efektif untuk program yang memerlukan partisipasi lintas aktor, legitimasi kebijakan, dan keberlanjutan sosial-ekologis, terutama ketika masyarakat berinteraksi dengan institusi pemerintah atau lembaga formal.

Sebaliknya, teori komunikasi adat lebih unggul ketika konteksnya adalah komunitas adat dengan struktur sosial dan budaya yang kuat, di mana norma, nilai, dan praktik tradisional menjadi dasar pengambilan keputusan. Teori ini efektif untuk memahami dinamika internal masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan berbasis kearifan lokal.

Sementara itu, teori komunikasi pembangunan partisipatif unggul dalam konteks proyek pembangunan atau advokasi yang memerlukan dialog, musyawarah, dan kapasitas komunikasi masyarakat, terutama di komunitas perkotaan atau multi-aktor. Teori ini menekankan proses pemberdayaan melalui komunikasi dua arah untuk memastikan partisipasi nyata dan kolaborasi lintas institusi.

Dengan demikian, posisi teori partisipasi publik berada pada titik tengah: ia menggabungkan aspek pemberdayaan dan integrasi pengetahuan seperti komunikasi pembangunan partisipatif, sekaligus menghargai konteks lokal seperti komunikasi adat, sehingga unggul ketika intervensi menuntut legitimasi, inklusivitas, dan keberlanjutan sosial-ekologis secara bersamaan.

#### f. Uji Relevansi pada Kasus Nyata Komunikasi Pembangunan di Indonesia

**Tabel 7. Uji Relevansi pada Kasus Nyata Komunikasi Pembangunan di Indonesia**

Aspek	Deskripsi Kasus	Aplikasi Teori Partisipasi Publik	Yang Dijelaskan Teori & Yang Tidak	Implikasi Desain Intervensi Komunikasi
<b>Kasus 1: Program Konservasi</b>	Program pemberdayaan masyarakat desa	- <b>Aktor:</b> masyarakat desa, pemerintah desa, lembaga konservasi. -	<b>Dijelaskan baik:</b> peran aktor, proses	- <b>Strategi:</b> fasilitasi musyawarah desa, integrasi

Aspek	Deskripsi Kasus	Aplikasi Teori Partisipasi Publik	Yang Dijelaskan Teori & Yang Tidak	Implikasi Desain Intervensi Komunikasi
<b>Hutan Desa di Kalimantan Tengah</b>	untuk menjaga kawasan hutan dan mencegah deforestasi.	<p><b>Pesan:</b> pentingnya konservasi hutan berbasis komunitas. - <b>Saluran:</b> pertemuan desa, sosialisasi lapangan, radio lokal. - <b>Institusi:</b> desa, Dinas Kehutanan, LSM lingkungan. - <b>Relasi Kuasa:</b> distribusi kekuasaan sebagian adil, peran LSM sebagai fasilitator. - <b>Konteks Budaya:</b> penghormatan terhadap adat lokal dalam pengelolaan hutan.</p> <p>- <b>Aktor:</b> petani, penyuluh pertanian, LSM, pemerintah desa. - <b>Pesan:</b> manfaat pertanian organik dan pelestarian lingkungan. - <b>Saluran:</b> pelatihan lapangan, pertemuan kelompok tani, media sosial komunitas. - <b>Institusi:</b> kelompok tani, Dinas Pertanian, LSM. - <b>Relasi Kuasa:</b> petani diberdayakan dalam keputusan varietas dan praktik pertanian. - <b>Konteks Budaya:</b> mempertimbangkan praktik tradisional pertanian dan norma sosial desa.</p>	<p>partisipatif, integrasi pengetahuan lokal. <b>Tidak dijelaskan:</b> kendala kapasitas teknis, konflik kepentingan antara desa dan industri.</p> <p><b>Dijelaskan baik:</b> pemberdayaan masyarakat, proses partisipatif, legitimasi keputusan. <b>Tidak dijelaskan:</b> peran teknologi digital secara maksimal, hambatan ekonomi jangka panjang.</p>	<p>pengetahuan lokal dan ilmiah. - <b>Risiko:</b> resistensi jika keputusan top-down muncul. - <b>Etika:</b> menghormati hak dan praktik adat. - <b>Indikator Evaluasi:</b> jumlah partisipasi aktif, keberhasilan pengelolaan hutan, kepatuhan aturan adat.</p> <p>- <b>Strategi:</b> penguatan kapasitas kelompok tani, integrasi praktik lokal dan teknik organik modern. - <b>Risiko:</b> ketidaksetaraan akses informasi, konflik antarpetani. - <b>Etika:</b> inklusif bagi semua anggota komunitas. - <b>Indikator Evaluasi:</b> luas lahan organik, partisipasi anggota, kepatuhan praktik organik.</p>
<b>Kasus 2: Program Pertanian Organik Berbasis Komunitas di Jawa Tengah</b>	Kelompok tani mengembangkan pertanian organik dengan dukungan pemerintah dan LSM pertanian.	<p>- <b>Aktor:</b> nelayan, komunitas lokal, pemerintah desa, LSM</p>	<b>Dijelaskan baik:</b> partisipasi masyarakat,	- <b>Strategi:</b> melibatkan masyarakat dalam
<b>Kasus 3: Program Restorasi</b>	Komunitas pesisir dilibatkan dalam rehabilitasi			

Aspek	Deskripsi Kasus	Aplikasi Teori Partisipasi Publik	Yang Dijelaskan Teori & Yang Tidak	Implikasi Desain Intervensi Komunikasi
<b>Pesisir dan Mangrove di Sulawesi Selatan</b>	mangrove untuk mitigasi bencana dan konservasi perikanan.	konservasi. - <b>Pesan:</b> pentingnya mangrove untuk mitigasi bencana dan sumber mata pencaharian. - <b>Saluran:</b> pelatihan lapangan, kampanye komunitas, media lokal. - <b>Institusi:</b> desa, Dinas Kelautan, LSM. - <b>Relasi Kuasa:</b> partisipasi sebagian besar nyata, lembaga pemerintah tetap memegang keputusan kunci. - <b>Konteks Budaya:</b> penghormatan terhadap hak akses nelayan tradisional dan praktik adat pesisir.	legitimasi sosial, integrasi nilai lokal. <b>Tidak dijelaskan:</b> keterbatasan sumber daya teknis, kendala koordinasi antarinstansi.	penanaman dan monitoring mangrove, integrasi kearifan lokal. - <b>Risiko:</b> resistensi akibat keputusan pemerintah dominan, konflik akses lahan. - <b>Etika:</b> menghormati hak akses dan praktik lokal. - <b>Indikator Evaluasi:</b> luas mangrove direstorasi, tingkat partisipasi, dampak mitigasi bencana.

## KESIMPULAN

### a. Kesimpulan

Teori komunikasi lingkungan dalam kerangka partisipasi publik memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami dan mengelola kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat adat di Papua. Teori ini menekankan bahwa masyarakat adat bukan sekadar objek intervensi, melainkan aktor aktif yang memiliki pengetahuan lokal, kapasitas, dan hak atas wilayahnya. Proses komunikasi partisipatif berfungsi sebagai mekanisme integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah, membangun legitimasi keputusan, dan memperkuat keberlanjutan sosial-ekologis.

Namun, efektivitas teori ini dipengaruhi oleh konteks institusi, distribusi kekuasaan, budaya, dan kapasitas aktor. Partisipasi simbolik atau kurangnya dukungan institusi dapat membatasi pencapaian tujuan konservasi. Dengan demikian, penerapan teori partisipasi publik pada pengelolaan kawasan konservasi di Papua menuntut strategi komunikasi yang inklusif, menghormati adat, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengantisipasi risiko konflik atau bias, sehingga tercapai pembangunan konservasi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat adat.

### b. Kontribusi Teoretik

Paper ini memberikan kontribusi teoretik dengan memperjelas proposisi dan mekanisme teori partisipasi publik dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat adat. Peta konsep yang dihasilkan menekankan hubungan logis antara:

1. Aktor terdiri dari masyarakat adat sebagai subjek aktif.

2. Proses komunikasi terdiri dari dialog, musyawarah, dan integrasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah.
3. Distribusi kekuasaan terdiri dari partisipasi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kekuasaan antara masyarakat dan institusi.
4. Keberlanjutan sosial-ekologi merupakan hasil partisipasi nyata meningkatkan legitimasi keputusan, mengurangi konflik, dan mendukung konservasi jangka panjang. Sintesis lintas literatur menunjukkan bahwa teori partisipasi publik unggul ketika intervensi komunikasi: menghormati nilai dan norma adat, memberdayakan masyarakat sebagai aktor, dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang inklusif dan berkelanjutan.  
 Dengan demikian, paper ini memperkuat landasan konseptual teori partisipasi publik dan memberikan arah bagi desain intervensi komunikasi lingkungan yang lebih efektif dan responsif terhadap konteks sosial-ekologis Papua.

c. Keterbatasan Paper

1. Keterbatasan data empiris. Paper ini lebih bersifat tinjauan teori dan sintesis literatur, sehingga generalisasi terhadap kondisi lapangan di Papua masih terbatas.
2. Fokus pada teori partisipasi public. Pembahasan teori pembandingan dan pendekatan komunikasi lain hanya terbatas pada ilustrasi, sehingga analisis interaksi antar-teori belum mendalam.
3. Konteks spesifik. Penekanan pada masyarakat adat Papua mungkin kurang relevan untuk konteks perkotaan atau komunitas non-adat, sehingga perlu adaptasi jika diterapkan di wilayah lain.
4. Keterbatasan kuantitatif. Dampak jangka panjang dari partisipasi masyarakat terhadap keberlanjutan sosial-ekologis masih belum diuji secara kuantitatif.

**DAFTAR REFERENSI**

- Arnstein, S. R. (1969). Ladder of Citizen Participation This publication is made available in the context of the history of social work project . *AIP Journal*, July. [https://www.historyofsocialwork.org/1969\\_ENG\\_Ladderofparticipation](https://www.historyofsocialwork.org/1969_ENG_Ladderofparticipation)
- Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). *Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence*. 114(5), 49–56.
- Boissière, M., et al. (2019). The role of indigenous peoples in biodiversity conservation. *Conservation & Society*. In *Policy that works for forest and people* (2nd ed., pp. 189–202). International Institute for Environment and Development. [https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf\\_files/articles/ABoissiere0401.pdf](https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/articles/ABoissiere0401.pdf)
- Carvalho, A. (2010). Media Discourses and Climate Change : a Focus on Political Subjectivity and Engagement. *Public Understanding of Science*, 172–188. <https://hdl.handle.net/1822/27579>
- Chambers, R. (2008). *Whose Reality Counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications. <https://staff.washington.edu/jhannah/geog335aut07/readings/Chambers - WhoseReality Ch1%262.pdf>
- Cox, R. (2013). *Environmental and the Public Sphere*. Sage Publications. <https://robert-cox-environmental-communication-and-the-public-sphere.pdf>
-

- Filer, C., & Sekhran, N. (2018). *The political economy of conservation in Papua New Guinea. Pacific Conservation Biology. January*, 5–16. <https://www.publish.csiro.au/PC/PC20016>
- Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). *Indigenous knowledge for biodiversity conservation. Ambio* (pp. 151–156). <https://repository.ias.ac.in/64142/>
- Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondizio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V, Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A Spatial Overview of The Global Importance of Indigenous lands For Conservation. *Nature Sustainability*, 1(7), 369–374. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6>
- Hansen, A., & Robert, J. (2015). *The Routledge Handbook of Environment and Communication Informasi bibliografi*. 47. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=961792>
- Kamau, M. M., & Khsiebi, A. K. (2022). *Voicing participation in large-scale infrastructural projects : A contextualization of participatory communication in Lamu Port , Kenya. 14(June)*, 53–67. <https://doi.org/10.5897/JMCS2022.0765>
- Kurniawan, E. & T. (2002). *Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode*. 1–30. <https://media.neliti.com/media/publications/155692-ID-partisipasi-publik-konsep-dan-metode.pdf?>
- Pretty, J. (2011). *Interdisciplinary progress in approaches to address social-ecological and ecocultural systems*. 38(2), 127–139. <https://doi.org/10.1017/S0376892910000937>
- Reed, M. S. (2008). *Stakeholder participation for environmental management : A literature review. 141(10)*, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014>
- Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). *Publication : Participatory Communication : A Practical Guide cb Greening Digital in Korea Environmental Implications of a Central Bank Digital Currency ( CBDC ) Assessment of the Labor Market Information System ( LMIS ) in the Lao People ' s Democratic R*. 1–5. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8008-6>
-